



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 27. TAHUN 2019

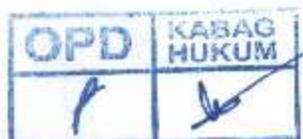
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 dan Nomor 37 Tahun 2013, serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 - 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.



4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas yang dimulai dari tahun 2018-2022.
9. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi.
10. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran.
11. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
12. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD.
13. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
14. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
15. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
16. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
18. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
19. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
20. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.



BAB II  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah maka disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022;

Pasal 3

*Road Map* Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arahan pelaksanaan reformasi dilingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan.

BAB III  
QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

*Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Penerapan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja; dan
- b. Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan pada beberapa OPD;

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri atas:

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

B. Sasaran

C. Kegiatan-kegiatan

D. Rencana Aksi

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

B. Evaluasi

BAB V PENUTUP

(2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

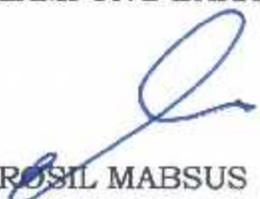
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

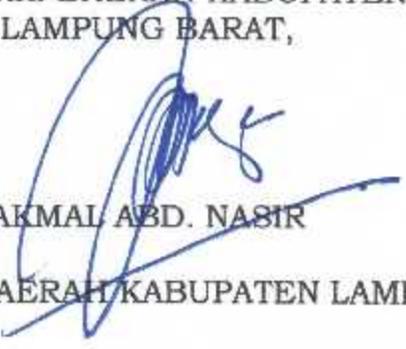
Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

  
AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 27

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Organisasi	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Barat, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2018 - 2022. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu telah diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten Lampung Barat, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK melalui BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;

3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat Kabupaten juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat Kabupaten juga sudah menerapkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang akan terus dikembangkan

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan program semua bisa melanjutkan sekolah telah melaksanakan pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/MI, SMP/MTs dan beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di kedokteran Perguruan Tinggi Negeri;
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan akreditasi seluruh puskesmas di Kabupaten Lampung Barat;
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program Ambulan Hebat;
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan pelayanan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program KTP, KK, KIA, dan Akte gratis;
5. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja juga melaksanakan pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat Lampung Barat;
6. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat juga melaksanakan penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah meliputi kasus penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, indisipliner, asusila, kehilangan SK, permohonan gugatan cerai yang menyangkut Aparatur Sipil Negara dan Peratin (Kepala Desa).

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah berhasil memperoleh nilai dengan kategori B;
2. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Lampung Barat juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah dikembangkan SIKD untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel;
3. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID);
4. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepegawaian telah dibangun Sistem Informasi Pegawai Online (SIP Online).

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikam pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten Lampung Barat, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pekon/desa terpencil;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh OPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat



menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;

3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
  - a. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai BB atau A;
  - b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;
  - c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
  - d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Lampung Barat;
3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih perlu perbaikan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, langkah-langkah dalam rangka pengembangan SDM antara lain:



1. Melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pengisian jabatan;
3. Dalam pengisian jabatan tinggi pratama dilaksanakan seleksi terbuka;
4. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepegawaian telah dibangun Sistem Informasi Pegawai Online (SIP Online).

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai langkah yang harus dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Perbaikan waktu Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat terus ditingkatkan agar tidak memakan waktu yang lama;
3. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas dan kualitas guru juga terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan terus ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur;
2. Efisiensi terkait dengan kelembagaan pemerintah daerah yang akan terus dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Penerimaan dan penempatan pegawai sudah dilakukan secara transparan sehingga mengurangi kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
4. Disiplin pegawai sudah mulai tinggi;
5. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan sudah sepenuhnya dijalankan dengan baik.

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

## a. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

### 1) Sumber Daya Manusia

Berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam area ini antara lain:

- a) Umumnya pegawai sudah memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- b) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya sudah dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- c) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;
- d) Manajemen kinerja pegawai sudah sepenuhnya diterapkan;
- e) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai sudah cukup baik akan tetapi masih perlu peningkatan;
- f) Para pemimpin/pejabat umumnya sudah dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.

### 2) Pengawasan

Berbagai langkah-langkah pengembangan dalam area ini antara lain:

- a) Secara kuantitas aparat pengawas di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih perlu ditambah namun secara kualitas sudah cukup baik, untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- b) Penerapan SPIP sudah dilaksanakan dan perlu peningkatan secara maksimal;
- c) Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas perlu ditingkatkan guna memberikan daya tarik bagi pegawai untuk mengembangkan karir di jabatan ini;



- d) Sudah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengawasan.

### 3) Tatalaksana

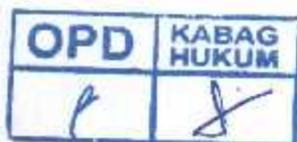
Berbagai langkah-langkah pengembangan dalam area ini antara lain:

- a) Mekanisme koordinasi yang kuat antara OPD dan unit kerja di masing-masing OPD, untuk mengurangi berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang akan berakibat pada inefisiensi;
- b) Belum diterapkan sistem e-audit dalam pengawasan dan penggunaan teknologi informasi sudah sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c) Standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor perlu dilakukan untuk mendorong efisiensi.

#### b. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai persoalan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- 1) Mempertahankan opini WTP dari BPK;
- 2) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- 3) Penyediaan sarana penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda khusus ASN dan Peratin (Kepala Desa);
- 4) Pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/MI, SMP/MTs dan beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di kedokteran Perguruan Tinggi Negeri;
- 5) Pelayanan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program KTP, KK, dan Akte gratis;
- 6) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program Ambulan Hebat;
- 7) Nilai akuntabilitas kinerja kategori B.



**c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.**

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

**Pertama**, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

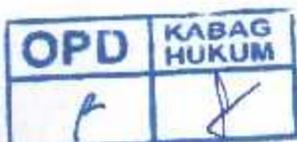
**1) Pendidikan**

Peningkatan kapasitas tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan melaksanakan distribusi yang merata. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang merata diseluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Lampung Barat. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan, mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

**2) Pelayanan Perizinan**

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena masih ada keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar OPD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- a) Perizinan Urusan Pertanian
- b) Perizinan Urusan Perikanan
- c) Perizinan Urusan Pekerjaan Umum
- d) Perizinan Urusan Pariwisata
- e) Perizinan Urusan Komunikasi & Informasi
- f) Perizinan Urusan Pertanahan
- g) Perizinan Urusan Kesehatan
- h) Perizinan Urusan Perdagangan
- i) Perizinan Urusan Perindustrian
- j) Perizinan Urusan Bidang Koperasi dan UKM
- k) Perizinan Urusan Penanaman Modal



**Kedua, Quick Wins.** Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang akan dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- 1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- 2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- 3) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang akan dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang akan menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan kepada masyarakat mengenai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Gratis;
- 2) Program Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perizinan sebagaimana menjadi prioritas sektor);
- 3) Program pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat melalui Ambulan Hebat.

**d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)**

Pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum ada OPD yang di usulkan berkaitan dengan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

OPD-OPD yang ada dipandang belum siap untuk melaksanakannya, selain belum memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, hal ini di karenakan Lampung Barat belum melaksanakan PMPRB oleh



Inspektorat sebagai leading sektornya. Tetapi diharapkan nantinya juga OPD yang mendapatkan tugas untuk menjadi contoh harus siap untuk di validasi.

OPD yang dipandang sudah mampu untuk dijadikan contoh Zona Integritas diharapkan nantinya bisa menjadi unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu OPD harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik lagi untuk kedepannya.

#### **e. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian OPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

##### **1) Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan**

Prioritas lain dalam sektor pendidikan adalah penyediaan sarana penunjang yang meliputi antara lain penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.

OPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi OPD yang berada digaris depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkrit sesuai dengan perencanaan.

##### **2) Ruang kegiatan belajar (RKB)**

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatif dan inovatif.

##### **3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik**

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

###### **a) Listrik**



Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Lampung Barat. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitasnya.

**b) Instalasi Air Bersih**

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten Lampung Barat.

**c) Jalan Kabupaten**

Prioritas lain yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kabupaten Lampung Barat.

**d) Jembatan**

Kondisi demografis Kabupaten Lampung Barat yang banyak terdapat pegunungan, perbukitan, sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

**e) Penyediaan Drainase**

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

**f) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.



**g) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum**

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh OPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap OPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

OPD	KABAG HUKUM
<i>A</i>	<i>X</i>

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Barat merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Barat, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2018 - 2022. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah kabupaten Lampung Barat saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima



tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

OPD	KABAG HUKUM
	

**A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten Lampung barat, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat juga melaksanakan penanganan kasus pengaduan meliputi kasus penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, indisipliner, asusila, kehilangan SK, permohonan gugatan cerai yang menyangkut Aparatur Sipil Negara dan Peratin (Kepala Desa)

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/MI, SMP/MTs dan beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di kedokteran Perguruan Tinggi Negeri;

2. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program Ambulan Hebat;
3. Pelayanan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program KTP, KK, dan Akte gratis;
4. Pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat Lampung Barat;
5. Penanganan kasus pengaduan dilindungi Pemerintah daerah meliputi kasus penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, indisipliner, asusila, kehilangan SK, permohonan gugatan cerai yang menyangkut Aparatur Sipil Negara dan Peratin (Kepala Desa).

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah berhasil memperoleh nilai kategori B;
2. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Lampung Barat juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah dikembangkan SIKD untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel;
3. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah)

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

#### **B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan**

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi terfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat

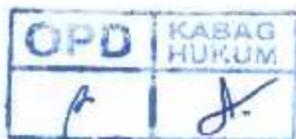
- mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikam pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
  3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten Lampung Barat, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mencegah atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah Pekon/desa terpencil;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh OPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
  - a. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai BB atau A;
  - b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;



- c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
  - d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Lampung Barat;
  3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

### C. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih perlu perbaikan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, langkah-langkah dalam rangka pengembangan SDM antara lain:

1. Penyusunan standar kompetensi jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pengisian jabatan;
3. Dalam pengisian jabatan tinggi pratama dilaksanakan seleksi terbuka;
4. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepegawaian telah dibangun Sistem Informasi Pegawai Online (SIP Online).

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai langkah yang harus dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Perbaikan waktu Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat terus ditingkatkan agar tidak memakan waktu yang lama;
3. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas dan kualitas guru juga terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan terus ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur;



2. Efisiensi terkait dengan kelembagaan pemerintah daerah yang akan terus dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Penerimaan dan penempatan pegawai sudah dilakukan secara transparan sehingga mengurangi kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
4. Disiplin pegawai sudah mulai tinggi;
5. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan sudah sepenuhnya dijalankan dengan baik.



**A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi**

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

**1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah**

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

**a. Sumber Daya Manusia**

Berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam area ini antara lain:

- a) Umumnya pegawai sudah memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- b) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya sudah dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- c) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;
- d) Manajemen kinerja pegawai sudah sepenuhnya diterapkan;
- e) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai sudah cukup baik akan tetapi masih perlu peningkatan;
- f) Para pemimpin/pejabat umumnya sudah dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.

## b. Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar OPD (Survey yang melibatkan Tim Teknis) yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- a) Perizinan Urusan Pertanian
- b) Perizinan Urusan Perikanan
- c) Perizinan Urusan Pekerjaan Umum
- d) Perizinan Urusan Pariwisata
- e) Perizinan Urusan Komunikasi & Informasi
- f) Perizinan Urusan Pertanahan
- g) Perizinan Urusan Kesehatan
- h) Perizinan Urusan Perdagangan
- i) Perizinan Urusan Perindustrian
- j) Perizinan Urusan Bidang Koperasi dan UKM
- k) Perizinan Urusan Penanaman Modal

**Kedua, Quick Wins.** Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih akan menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Adapun jenis-jenis pelayanan yang akan menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

Untuk meningkatkan pelayanan secara cepat, tepat, dan berkualitas dilakukan dengan inovasi pelayanan diantaranya :



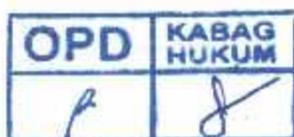
- a. Pelayanan two in one (KK dan KTP), pelayanan three in one (KK, KTP, dan Akta Kelahiran), pelayanan four in one ( KK, KTP, Akta Kelahiran, dan KIA), pelayanan five in one ( KK, KTP, Akta Kelahiran, KIA, Akta Kematian/akta perceraian);
- b. Pelayanan dinamis/jemput bola ke sekolah-sekolah (perekaman e-KTP dan KIA);
- c. Pelayanan dinamis/jemput bola ke pekon/desa/kelurahan dan mencetak dokumen di tempat;
- d. Pelayanan pada moment-moment tertentu (Kesrak PKK, KB Kesehatan lomba pekon/desa, bulan Bhakti Gotong Royong, dan Kampung KB);
- e. Pelayanan akte kelahiran secara online, dapat dilakukan dengan hanya menggunakan android yang terhubung dengan internet (registrasi pada <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline>).
- f. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui “Diskon Hebat/datang investasi langsung konstruksi dengan hemat, benar, dan cepat (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan sebagaimana menjadi prioritas sektor).
- g. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program “Ambulan Hebat” (Kegiatan ini ditujukan sebagai salah satu solusi untuk transportasi pasien gawat darurat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja puskesmas yang didukung oleh Unit Ambulans Hebat dengan 3 (tiga) orang tenaga kesehatan dan 2 (dua) orang supir yang bertugas selama 24 jam).

### c. Kesehatan

Pelaksanaan program kesehatan dilakukan untuk menjawab isu strategis pembangunan di Kabupaten Lampung Barat khususnya pada sektor kesehatan, antara lain:

#### (1) Kematian ibu & bayi

Perlu dilakukannya semua upaya pendukung yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak sehingga akan berdampak pada terus berkurangnya kematian ibu dan bayi yang diakibatkan oleh kurang optimalnya upaya pelayanan kesehatan pada ibu dan anak.



(2) Kasus gizi buruk

Penanganan kasus gizi buruk tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun juga harus mendapat perhatian dari semua sektor terkait, karena persoalan gizi buruk merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan banyak faktor antara lain status ekonomi, sosial budaya, ketahanan pangan dan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat.

(3) Angka kesakitan akibat penyakit menular

Penyakit menular harus terus dilakukan pencegahan dan pengendalian yang melibatkan peran serta masyarakat dan juga perlu diwaspadainya kemungkinan untuk terjadinya *re-emerging disease*.

(4) Meningkatnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM)

Meningkatnya taraf hidup sebagian masyarakat berdampak pada terjadinya perubahan pola hidup yang cenderung tidak seimbang, hal tersebut meningkatkan faktor resiko terjangkitnya seseorang dengan PTM. Pencegahan dengan melakukan deteksi dini serta dengan melakukan pola hidup sehat dan seimbang saat ini menjadi prioritas utama yang sedang digiatkan oleh segenap pengambil kebijakan di pemerintahan pusat yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

(5) Pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Target Total Coverage pada tahun 2019, dimana seluruh penduduk Kabupaten Lampung Barat terdaftar sebagai peserta JKN, merupakan pekerjaan rumah yang harus dapat diselesaikan. Sehingga segenap masyarakat di Lampung Barat dapat mengakses pelayanan kesehatan baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun pihak swasta yang sudah bekerjasama dengan BPJS.



(6) Ketersediaan SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan.  
Pemenuhan SDM kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan harus terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai upaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

(7) Ambulans Hebat

Kegiatan ditujukan sebagai salah satu solusi untuk transportasi pasien gawat darurat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja puskesmas yang didukung oleh Unit Ambulans Hebat dengan 3 (tiga) orang tenaga kesehatan dan 2 (dua) orang supir yang bertugas selama 24 jam.

a. Prinsip Kerja

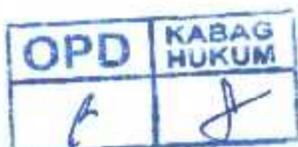
Prinsip kerja kegiatan Ambulans Hebat adalah :

- Pertolongan harus cepat dan tepat
- Memberikan informed consent
- Memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi
- Memindahkan pasien dari rumah ke FKTP
- Memindahkan pasien dari TKP ke FKTP
- Pelayanan kesehatan diberikan secara gratis sampai tiba di FKTP

b. Prosedur Kerja

Prosedur kerja pemanfaatan Ambulans Hebat adalah :

- Menerima informasi kegawatdaruratan
- Menuju lokasi pasien
- Menilai kondisi pasien dengan cepat dan teliti
- Pengkajian awal pasien
- Stabilisasi pasien menurut prioritas
- Konsultasi dokter
- Menentukan tindakan pelayanan kesehatan sampai dengan evakuasi rujukan kefasilitas kesehatan lanjutan.



perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.

OPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi OPD yang berada di garis depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkrit sebagaimana direncanakan dalam dokumen ini.

**b. Ruang kegiatan belajar (RKB)**

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatif dan inovatif.

**c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik**

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

**1) Listrik**

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Lampung Barat. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keajegannya.

**2) Instalasi Air Bersih**

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat dilokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten Lampung Barat

**3) Jalan Kabupaten**

Prioritas lain yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kabupaten Lampung Barat.



#### **4) Jembatan**

Kondisi demografis Kabupaten Lampung Barat yang banyak terdapat perbukitan, pegunungan dan sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

#### **5) Penyediaan Drainase**

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

#### **6) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau**

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

#### **7) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum**

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas OPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh OPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap OPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

OPD	KABAG HUKUM
	

## B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

#### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompoten	ASN Lampung Barat yang sesuai dengan standar Kompetensi	40 orang				
Meningkatnya Manajemen Kepegawaian yang berkualitas dan akuntabel	Pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi Jabatan	2 Jabatan	3 Jabatan	3 Jabatan	3 Jabatan	3 Jabatan

#### b. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan internal secara berkala	163 laporan				
	Jumlah laporan hasil penanganan kasus pengaduan	32 laporan				
	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD LHR Lapkin Pemda	29 LHE dan 1 LHR				
	Jumlah Laporan Hasil TLHP APIP	2 Laporan				
	Jumlah Laporan Hasil TLHP BPK	1 Laporan				
Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Peserta Diklat Sertifikasi JFA dan P2UPD	6 Orang				



	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4 DC
	Level Maturitas SPIP		Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
Terlaksananya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD	1 LHR				
	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA	1 LHR				
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran	4 LHR				
	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKPD	1 LHR				
	Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD	1 LHR	0 LHR	0 LHR	0 LHR	0 LHR

### c. Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemda yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntable	Jumlah OPD yang menyusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	4 OPD				
	Jumlah dokumen Tatalaksana	2 dokumen	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
	Jumlah OPD yang menyusun SPM	5 OPD				
	Jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi tupksi	1 Dokumen	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.
	Jumlah OPD yang terbina mengenai pelayanan publik	6 OPD				
	Jumlah Dokumen SOP	1 dok	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.
	Jumlah kasus yang terselesaikan (SIPP dan SP4N)	1 kasus				
	Jumlah dokumen kebutuhan PNS	1 dok				
	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	1 dok				
Meningkatnya Layanan Informasi Kepada Masyarakat	Jumlah Aplikasi Pelayanan publik	6 aplikasi				



**d. Peraturan Perundang-undangan**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat	Jumlah aparaturnya yang mengikuti penyusunan produk hukum daerah	60 orang				
	Jumlah Perda yang dilakukan fasilitasi pembentukannya	10 Perda				
	Jumlah Perbup dan Keppub yang dilakukan harmonisasi dalam pembentukannya	35 Perbup dan 350 Keppu P				
	Jumlah peraturan Perundang-undangan yang dipublikasikan ke OPD	25 Peraturan perundang-undangan				
	Jumlah produk hukum daerah yang disosialisasikan kepada masyarakat	8 produk hukum				
	Jumlah desa/pekon/kelurahan yang mengikuti kegiatan desa sadar hukum tingkat Kabupaten	15 desa/kelurahan dari 15 kecamatan				
	Jumlah permasalahan hukum dan aparaturnya yang dilakukan pendampingan bantuan	1 permasalahan dan 1 aparaturnya				



**2. Prioritas yang harus terus dipelihara**

**a. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Predikat Opini) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

**b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%

**c. Kegiatan Penanganan Kasus Dilingkungan Pemerintah Daerah**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil penanganan kasus pengaduan	32 kasus				

**d. Semua bisa melanjutkan sekolah**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2020	2022
Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan pendidikan	Angka partisipasi kasar (APK) SD	11,84 %	11,87 %	11,89 %	11,91 %	11,93 %
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	99,33 %	99,53 %	99,73 %	99,93 %	99,95 %
	Angka partisipasi murni (APM) SD	100%	100%	100%	100%	100%



Angka partisipasi murni (APM) SMP	91,82 %	91,87 %	91,89 %	91,94 %	91,99 %
Angka rata-rata lama sekolah	7,30 tahun	7,35 tahun	7,37 tahun	7,42 tahun	7,44 tahun
Angka harapan lama sekolah	12,27 tahun	12,29 tahun	12,31 tahun	12,33 tahun	12,35 tahun
Angka melanjutkan sekolah	90,35 %	90,60 %	90,75 %	90,83 %	90,85 %
Nilai rata-rata ujian nasional (UN) SD	209,9 6 poin	210,0 1 poin	210,1 1 poin	210,2 1 poin	210,3 1 poin
Nilai rata-rata ujian nasional (UN) SMP	235,9 1 poin	236,0 1 poin	236,1 1 poin	236,2 1 poin	236,3 1 poin
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	32,09 %	32,11 %	32,13 %	32,15 %	32,17 %

**e. Peningkatan kompetensi guru**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan pendidikan	Persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1	73,99 %	74,02 %	74,03 %	74,05 %	74,06 %
	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi S1	25,90 %	30,90 %	31,90 %	32,90 %	33,90 %
	Persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1	73,97 %	73,98 %	73,98 %	74,00 %	74,06 %
	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi S1	25,90 %	30,90 %	31,90 %	32,90 %	33,90 %
	Persentase Guru yang memiliki sertifikat sertifikasi	60,10 %	60,12 %	60,18 %	60,26 %	60,58 %

**f. Saluran Telekomunikasi dan internet**

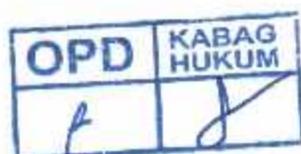
Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya layanan informasi kepada masyarakat	Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet	97%	97%	97%	97%	97%



**g. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat**

NO	Sasaran	Indikator	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah UPT Puskesmas terakreditasi	4 Puskesmas	2 Puskesmas	2 Puskesmas	9 Puskesmas	4 Puskesmas
		Jumlah UPT Puskesmas dengan pengelolaan keuangan dan pelayanan secara mandiri	0 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas
		Jumlah UPT Puskesmas dengan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	8 Puskesmas	3 Puskesmas	0 Puskesmas	0 Puskesmas	0 Puskesmas
		Jumlah UPT Puskesmas dengan tenaga sesuai standar	3 Puskesmas	6 Puskesmas	9 Puskesmas	12 Puskesmas	15 Puskesmas
2	Meningkatnya upaya promotif dan preventif dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan pada kondisi krisis kesehatan	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas
		Jumlah pekon dengan IKS 0,5-0,8	5 Pekon				
		Jumlah KK di Pekon/Kelurahan terdata lengkap	60000 KK	19592 KK	0 KK	0 KK	0 KK
3	Meningkatnya kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Persentase obat yang memenuhi syarat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
4	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 Kelahiran Hidup	149 Kelahiran hidup	139 Kelahiran hidup	130 Kelahiran hidup	121 Kelahiran hidup	110 Kelahiran hidup
		Angka Kematian Bayi (AKB)	4,7 Kelahiran hidup	4,5 Kelahiran hidup	4,3 Kelahiran hidup	4,1 Kelahiran hidup	3,9 Kelahiran hidup

		Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase penurunan prevalensi balita kurus (wasting)	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
		Persentase penurunan prevalensi balita stunting	35 %	32 %	30 %	27 %	25 %
5	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	50 %	55 %	57 %	60 %	62 %
		Persentase Penemuan Kasus Baru TBC	50 %	60 %	65 %	68 %	70 %
		Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)	93 %	95 %	95 %	95 %	96 %
6	Meningkatnya sinergitas dan kemitraan lintas sektor, LSM dan dunia usaha	Persentase Peserta JKN	75 %	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya lingkungan sehat	Jumlah pekon/kelurahan dipicu STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	30 Pekon	33 Pekon	0 Pekon	0 Pekon	0 Pekon
		Persentase rumah sehat	49 %	55 %	60 %	65 %	70 %
8	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pegawai yang diterima (tenaga kesehatan)	30 orang	15 orang	0 orang	0 orang	0 orang
		Jumlah pegawai yang diterima (Tim Monitoring)	4 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang
		Jumlah pegawai yang diterima (Sopir)	20 orang	25 orang	0 orang	0 orang	0 orang
		Jumlah peserta yang mengikuti simulasi	0 orang	45 orang	0 orang	0 orang	0 orang



	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PPGD	40 orang	20 orang	0 orang	0 orang	0 orang
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Sopir	20 orang	25 orang	0 orang	0 orang	0 orang
	Jumlah perlengkapan ambulans hebat	10 paket	5 paket	0 paket	0 paket	0 paket
	Jumlah operasional ambulans hebat	10 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan

#### h. Indeks Reformasi Birokrasi kategori C

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	-	C	C	C	C

#### i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (predikat)	B	B	BB	BB	BB

#### j. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Predikat C

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (predikat)	-	C	C	C	C

**k. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Predikat Sangat Tinggi)**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Predikat)	Sangat tinggi				

**l. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Aplikasi yang terintegrasi (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan)	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

**3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan**

**a. Peningkatan kompetensi guru**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan pendidikan	Persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1	73,99 %	74,02 %	74,03 %	74,05 %	74,06 %
	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi S1	25,90 %	30,90 %	31,90 %	32,90 %	33,90 %
	Persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1	73,97 %	73,98 %	73,98 %	74,00 %	74,06 %
	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi S1	25,90 %	30,90 %	31,90 %	32,90 %	33,90 %
	Persentase Guru yang memiliki sertifikat sertifikasi	60,10 %	60,12 %	60,18 %	60,26 %	60,58 %



**b. Pelayanan Perizinan Terpadu**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73 (B)	75 (B)	76 (B)	78 (B)	80 (B)

**c. Pelayanan Gratis Administrasi Kependudukan**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	68,16 %	70%	75%	80%	85%
	Jumlah Keluhan /pengaduan masyarakat	0	0	0	0	0
2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Cakupan kepemilikan KIA	8,33%	30,55 %	52,77 %	75%	100%
	Cakupan kepemilikan KTP	87%	90%	95%	98%	100%
	Cakupan Kepemilikan KK	85%	87%	90%	95%	100%
	Cakupan kepemilikan Akte kelahiran	85%	95%	100%	100%	100%
	Cakupan kepemilikan akte perkawinan	50%	55%	60%	65%	70%
	Cakupan kepemilikan akte perceraian	10%	20%	22%	25%	27%
	Cakupan kepemilikan akte kematian	50%	55%	60%	65%	70%

**d. Jumlah Investasi Pemilikan Modal Dalam Negeri/Pemilikan Modal Asing (PMDN/PMA)**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Investor di Lampung Barat	Jumlah investor Pemilikan Modal Dalam Negeri dan Pemilikan Modal Asing (PMDN/PMA)	3 Investor	3 Investor	4 Investor	5 Investor	5 Investor
	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA	Rp 3.325.564.458	Rp 3.491.842.681.	Rp 3.666.434.815.	Rp 3.849.756.556.	Rp 4.042.224.384.

**4. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Membangun Unit Kerja sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	-	2 OPD	3 OPD	4 OPD	5 OPD

**5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil PMPRB	1 Laporan				

**6. Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terlaksananya Koordinasi TP4D	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi TP4D Kabupaten Lampung Barat	4 laporan				

## 7. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing OPD yang bertanggungjawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

### C. Kegiatan-kegiatan

#### 1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

##### a. SDM

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Melakukan analisis jabatan;
- 2) Melakukan analisis beban kerja;
- 3) Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di OPD sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- 4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing OPD, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun.
- 5) Memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
- 6) Melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
- 7) Melaksanakan sistem rekrutment terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;

**Catatan:** Kegiatan 1) sampai dengan 7) merupakan prioritas jangka pendek yang juga menjadi prioritas nasional.

- 8) Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
- 9) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
- 10) Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
- 11) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- 12) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- 13) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk



- sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 14) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
  - 15) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
  - 16) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
  - 17) Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model;
  - 18) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
  - 19) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
  - 20) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **b. Pengawasan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
- 2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
- 3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
- 4) Melaksanakan penerapan SPIP
- 5) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini WTP dari BPK, dan penerapan SPIP;
- 6) Memperbaiki SOP pengawasan;
- 7) Menerapkan SOP Pengawasan;
- 8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;

#### **c. Tatalaksana**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:



- 1) Memetakan proses bisnis penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- 2) Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- 3) Menyusun SOP;
- 4) Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi;
- 5) Memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 6) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;
- 7) Menerapkan keterbukaan informasi publik;
- 8) Menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor;
- 9) Menerapkan standarisasi fasilitas kantor;
- 10) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 11) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 12) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

## **2. Prioritas yang harus terus dipelihara**

### **a. Mempertahankan opini WTP dari BPK**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi:

- 1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan;
- 2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
- 3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
- 4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- 5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- 2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan.
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**c. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan sarana pengaduan meliputi:

- 1) Merencanakan pengembangan proses pengaduan;
- 2) Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;
- 3) Mengelola pengaduan;
- 4) Memonitor tindak lanjut pengaduan;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

**d. Semua bisa melanjutkan sekolah**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan pendidikan semua bisa melanjutkan sekolah meliputi:

- 1) Mengangkat guru honorer menjadi guru kontrak;
- 2) Seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs;
- 3) Bantuan siswa berprestasi;
- 4) Meningkatkan mutu pendidikan;
- 5) Beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di Kedokteran Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
- 6) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan semua bisa melanjutkan sekolah;
- 7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan semua bisa melanjutkan sekolah;



- 8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**e. Peningkatan kompetensi guru**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas guru meliputi:

- 1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 2) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi guru;
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

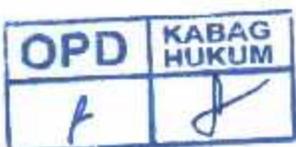
**f. Saluran Telekomunikasi dan internet**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyediaan saluran internet di sejumlah tempat, meliputi:

- 1) Mengidentifikasi tempat-tempat strategis yang akan diberikan akses telekomunikasi dan internet;
- 2) Menyusun rencana penambahan akses telekomunikasi dan internet di lokasi strategis beserta pembiayaannya;
- 3) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 4) Melaksanakan seluruh rencana;
- 5) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**g. Sistem integrasi layanan Jamkesmas**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem integrasi layanan Jamkesmas, meliputi:



- 1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan Jamkesnas;
- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan Jamkesnas terintegrasi dan pembiayaannya;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan Jamkesnas;
- 4) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**h. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat, meliputi:

- 1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kesehatan;
- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- 4) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi BB atau A, meliputi:

- 1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
- 3) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;



- 5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
- 6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- 7) Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
- 8) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

**j. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)**

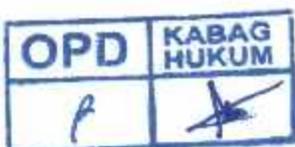
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan SIKD, meliputi:

- 1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem SIKD untuk perbaikan;
- 2) Menyusun rencana perbaikan;
- 3) Mengembangkan sistem SIKD yang terintegrasi dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 4) Melaksanakan SIKD sesuai dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 5) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

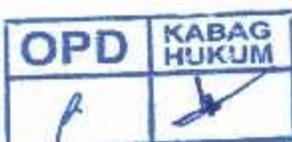
**3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan**

**a. Pelayanan Perizinan**

Pelayanan perizinan mengacu pada urusan pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja meliputi:



1. Urusan Pertanian
  1. Izin Usaha Obat Hewan
  2. Izin Usaha Peternakan
  3. Izin Rumah Potong Hewan
  4. Izin Rumah Potong Unggas
  
2. Urusan Perikanan
  1. Surat Izin Usaha Perikanan
  
3. Urusan Lingkungan Hidup
  1. Izin Lingkungan
  
4. Urusan Pekerjaan Umum
  1. Izin Mendirikan Bangunan
  2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
  3. Izin Pemasangan Reklame (SIPR)
  
5. Urusan Pariwisata
  1. Tanda Daftar Pariwisata (TDP)
  
6. Urusan Komunikasi dan Informasi
  1. Izin Menara Telekomunikasi
  
7. Urusan Pertanahan
  1. Izin Lokasi
  
8. Urusan Kesehatan
  1. Surat Izin Rumah Sakit
  2. Surat Izin Apotik
  3. Surat Izin Toko Obat
  4. Surat Izin Klinik
  5. Surat Izin Pendirian Optikal
  6. Surat Izin Laboratorium Klinik
  7. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
  8. Surat Izin Operasional Puskesmas
  9. Surat Izin Praktik Dokter
  10. Surat Izin Praktik Dokter Gigi
  11. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
  12. Surat Izin Apoteker
  13. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian



14. Surat Izin Praktik Perawat
  15. Surat Izin Praktik Bidan
  16. Surat Izin Praktik Perawat Gigi
  17. Surat Izin Fisiotrafis
  18. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
9. Urusan Perdagangan
1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
  4. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
  5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
  6. Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB)
10. Urusan Perindustrian
1. Izin Usaha Industri (IUI)
  2. Tanda Daftar Industri (TDI)
  3. Tanda Daftar Usaha (TDU)
11. Urusan Bidang Koperasi dan UKM
1. Izin Usaha Simpan Pinjam
12. Urusan Tenaga Kerja
1. Izin Operasional Penyedia Tenaga kerja Migran
  2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
  3. Kartu Pencari Kerja (AK1)
  4. Rekomendasi ID Calon Tenaga Kerja Migran
  5. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
13. Urusan Penanaman Modal
1. Izin Prinsip Penanaman Modal
  2. Izin Perluasan Penanaman Modal
  3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
  4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
  5. Izin Usaha



#### 4) Penerapan PTSP

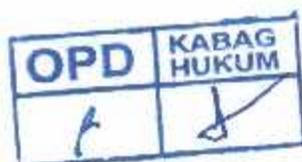
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan meliputi :

- (1). Pendelegasian kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja;
- (2). Pembentukan Tim Teknis Perizinan;
- (3). Menyusun SOP, SPP, dan maklumat Pelayanan;
- (4). Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (5). Melaksanakan Sosialisasi (secara langsung, media cetak);
- (6). Pendampingan layanan perizinan oss.go.id;
- (7). Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat;
- (8). Pelaksanaan pengelolaan layanan pengaduan (helpdesk);
- (9). Pengawasan dan Evaluasi.

#### 5) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- (a). Penyiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (b). Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (c). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada OPD yang telah ditetapkan;
- (d). Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
- (e). Monitoring
- (f). Evaluasi
- (g). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.



Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

Program	Kegiatan
<b>1. Peningkatan Manajemen SDM Aparatur</b>	1) Analisis Jabatan 2) Analisis beban Kerja 3) Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan 4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan OPD (termasuk tenaga auditor dan guru) 5) Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai 6) Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru 7) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu 8) Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai 9) Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor) 10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor) 11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai 12) Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai 13) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai
	14) Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya 15) Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku 16) Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian <i>role model</i> 17) Monitoring 18) Evaluasi 19) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 20) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
<b>2. Penguatan Pengawasan</b>	1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 3 dalam Program SDM) 2) Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM) 3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP



Program	Kegiatan
	4) Pencrapan SPIP 5) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 6) Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM) 7) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh OPD 8) Sosialisasi tertib administrasi keuangan 9) Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di OPD 10) Sosialisasi LHKPN 11) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat 12) Monitoring 13) Evaluasi 14) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 15) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3.	<b>Penataan Tatalaksana</b>
	1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan 2) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan) 3) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih 4) Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan SIKD) 5) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk SIKD) 6) Penerapan keterbukaan informasi publik 7) Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis 8) Penyusunan rencana penambahan akses telekomunikasi dan internet 9) Kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk pembukaan akses internet 10) Pembukaan akses internet baru 11) Monitoring 12) Evaluasi 13) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 14) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Tatalaksana Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
4.	<b>Penguatan Akuntabilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Review rencana strategis pemerintah daerah</li> <li>2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya</li> <li>3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja</li> <li>4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja</li> <li>5) Pelaksanaan manajemen kinerja</li> <li>6) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai</li> <li>7) Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja</li> <li>8) Monitoring</li> <li>9) Evaluasi</li> <li>10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi</li> <li>11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat</li> </ol>
5.	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, dan pelayanan administrasi kependudukan)</li> <li>2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan</li> <li>3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat</li> <li>4) Pengkajian penerapan PTSP</li> <li>5) Pengembangan PTSP</li> <li>6) Penerapan teknologi informasi</li> <li>7) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional)</li> <li>8) Monitoring</li> <li>9) Evaluasi</li> <li>10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi</li> </ol>
6.	<b>Penerapan PTSP</b>	(1). Pengkajian penerapan PTSP (dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan nomor 4) program Peningkatan Kualitas Pelayanan)



	Program	Kegiatan
		(2). Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP dalam waktu singkat (3). Penyusunan rancangan PTSP (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya) (4). Sosialisasi (5). Monitoring (6). Evaluasi (7). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (8). Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
7.	<b>Rencana Penetapan Quick Wins untuk tahun berikutnya</b>	(1). Identifikasi pelayanan strategis yang dapat dijadikan quick wins tahun berikutnya; (2). Perancangan quick wins untuk pelayanan strategis yang dipilih (3). Uji coba (4). Penyempurnaan hasil uji coba (5). Sosialisasi (6). Penerapan (7). Monitoring (8). Evaluasi (9). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (10). Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
8.	<b>Zona Integritas</b>	(1). Penyiapan OPD sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; (2). Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; (3). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di pada OPD yang ditetapkan (4). Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya (5). Monitoring (6). Evaluasi (7). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
9.	<b>Manajemen Perubahan</b>	Disusun secara terpisah dalam rencana manajemen perubahan
10.	<b>Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	Ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan
11.	<b>Penguatan dan Penataan Organisasi</b>	dijalankan hingga tahun 2022



#### 4. Prioritas OPD

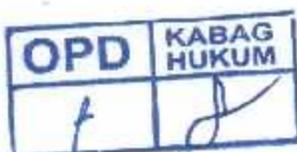
Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing OPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi OPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

#### D. Rencana Aksi

Dalam rencana aksi ini dijabarkan program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan program-program prioritas dan fokus perubahan, kegiatan, dan penanggungjawab kegiatan pada masing-masing OPD.

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi reformasi birokrasi sebagai berikut :



**Rencana Aksi Reformasi Birokrasi  
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2018-2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TARGET	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	2018												2019	2020	2021	2022
							TW 1			TW 2			TW 3			TW 4						
				PROGRAM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A	MANAJEMEN PERUBAHAN																					
	Meningkatnya kesadaran Beragama dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya Kualitas Kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan keagamaan	Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar Umat Beragama																		
				100%																		
					MTQ	Kabag Kesra													√	√	√	√

OPD	KABAG HUKUM

					Fasilitasi Penyelenggaraan haji/Umroh/ wisata rohani	Kabag Kesra									√	√	√	√
					Rangkaian Ramadhan, Idul Fitri dan Adha	Kabag Kesra									√	√	√	√
					Penyebaran Syiar Agama	Kabag Kesra									√	√	√	√
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya kesadaran siswa thd permasalahan kesehatan	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya perilaku hidup bersih, sehat dan derajat kesehatan siswa,	Pelaksanaan UKS/LSS	Kabag Kesra									√	√	√	√



		n																	
					30 Sekolah														
	Meningkatny a kualitas pelayanan sosial	Meningk atnya Fungsi, kualitas kepeduli an dan kesadara n masyara kat thd permasal ahan sosial	Peningkat an Kesetiaka wanan sosial	Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sosial	Monitoring dan Evaluasi hasil Bantuan hibah bidang keagamaan	Kabag Kesra										√	√	√	√
					122 lembaga														
	Meningkatny a kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pemkabh. Lampung Barat	Terbina dan Meningk atnya Pengetah uan Sumber Daya Aparatur	Pembinaa n dan Pengemba ngan Aparatur		Bagian Organisasi	Pembuata n SK Tim										√	√	√	√



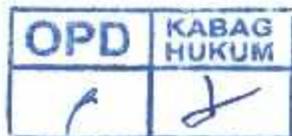
Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan RB dinilai masih belum terlalu kuat dan merata di seluruh unit kerja	meningkatkan validitas data pelaku ekonomi daerah	Jumlah buku data pelaku ekonomi Kab. Lampung Barat	Pendataan Pelaku Ekonomi Kabupaten Lampung Barat	1. membuat SK Bupati tentang Tim Koor Data Pelaku Ekonomi Kab. Lam-Bar, 2. Rapat Koordinasi, Monitoring Data Pelaku Ekonomi Kab. Lam-Bar, 3. Pembuatan Buku Data Pelaku Ekonomi	Bagian perekonomian dan SDA														
Terlaksananya Proses Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dilayani	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Surat masuk melalui bagian umum disposisi Asisten, Sekda, Distribusi ke OPD terkait		Kasubbag Umum & Kepegawaian									√	√	√	√		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Terlayannya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rekening listrik, Telepon, air diterima dibayarkan		Kasubbag Umum & Kepegawaian									√	√	√	√		



Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlayani nya Administ rasi perkanto ran dengan baik	Pelayanan Administ rasi Perkantor an	Penyewaan Tenda, Kursi, dan sound setiap ada acara PEMDA		Kasubbag Umum & Kepegawai an													
Tersedianya Biaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur Pemerintah	Terlayani nya Administ rasi Perkanto ran Dengan Baik	Pelayanan Administ rasi Perkantor an	--		Kasubbag Rumah Tangga									√	√	√	√	
Tersedianya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Terlayani nya Administ rasi Perkanto ran Dengan Baik	Pelayanan Administ rasi Perkantor an	Operasional administrasi Keuangan		Kasubbag Keuangan									√	√	√	√	
Tersedianya komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Terlayani nya Administ rasi Perkanto ran Dengan Baik	Pelayanan Administ rasi Perkantor an	Perbaikan instalasi listrik Perkantoran sesuai Kebutuhan		Kasubbag Rumah Tangga									√	√	√	√	



Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Terlayannya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tarup, Kursi, Soud disewakan jika ada Kegiatan Pemda		Kasubbag Rumah Tangga										√	√	√	√
Tersedianya Makanan dan Minuman	Terlayannya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biaya makan minum dipergunakan sesuai kebutuhan		Kasubbag Rumah Tangga										√	√	√	√
Tersedianya Biaya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Terlayannya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biaya makan minum dipergunakan sesuai kebutuhan		Kasubbag Umum & Kepegawain										√	√	√	√



Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah	Terlayannya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biaya Rapat koordinasi di gunakan seluruh bagian dilingkup Sekretariat sesuai kebutuhan		Kasubbag Umum & Kepegawaian							√	√	√	√
Tersedianya Kamar Penginapan	Terlayannya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sewa gedung/ Penginapan digunakan pada saat ada tamu		Kasubbag Rumah Tangga							√	√	√	√
Tersedianya biaya Jasa TV berbayar, internet dan sandi	Terlayannya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa indivision dan Kavision dibayar setiap Bulan		Kasubbag Umum & Kepegawaian							√	√	√	√



Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tercapainya Kinerja Pelayanan Administrasi Keuangan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Honor petugas kebersihan dibayarkan, alat kebersihan terpenuhi, pemeliharaan rumah jabatan dapat dilaksanakan		Kasubbag Rumah Tangga							√	√	√	√
Terjaganya Perlengkapan Rumah Dinas Dengan Baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Rumah Jabatan /Dinas		Kasubbag Rumah Tangga							√	√	√	√
Terjaganya Peralatan Rumah Dinas dengan baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kasubbag Rumah Tangga							√	√	√	√
Terjaganya peralatan Gedung Kantor dengan baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kasubbag Umum & Kepegawaian							√	√	√	√



	Terpeliharanya Meubeler dengan baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kasubbag Rumah Tangga										√	√	√	√
	Bertambahnya kemampuan Aparatur dalam melaksanakan	Meningkatnya Pengetahuan Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kasubbag Umum & Kepegawaian										√	√	√	√
	Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan										√	√	√	√
	Tersedianya Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan										√	√	√	√

Tersedianya Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan													√	√	√	√	
Tersedianya Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan														√	√	√	√
Tersedianya Laporan Keuangan	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan														√	√	√	√

OPD	KABAG HUKUM

Meningkatkan layanan kedinasan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Singronisasi program dengan Kebutuhan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah	1. Membuat Undangan 2, Pelaksanaan Audensi		Kasubbag Umum & Kepegawain							√	√	√	√
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pemkab. Lampung Barat	Presentase OPD yang Indeks Reforasi Birokrasi nya minimal baik	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pembuatan SK Tim		Bagian Organisasi							√	√	√	√
			Pembuatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi									√	√	√	√
			Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi									√	x	X	x
Persepsi dan penerapan reformasi birokrasi belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh aparatur	Meningkatnya pola pikir dan budaya kinerja aparatur Dinas Ketahanan	Persentase aparatur yang kinerjanya baik		Mengirimkan peserta diklat, perubahan perilaku kerja								x	√	√	√

		Pangan																				
	Rendahnya minta masyarakat terhadap pendidikan di lihat dari rata-rata lama sekolah.	Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Pendidikan Non formal	Persentase penduduk tidak sekolah mengikuti pendidikan Non Formal		1. Membuat Draf Kegiatan												√	√	√	√		
					2.Membuat SK Kegiatan																	
					3. Membuat SPT																	
					4. Membuat Laporan																	
					1. Membuat Draf Kegiatan																	
					2.Membuat SK Kegiatan																	
					3. Membuat SPT																	
					4. Membuat Laporan																	
					1. Membuat Draf Kegiatan																	
					2.Membuat SK Kegiatan																	
					3. Membuat SPT																	
					4. Membuat Laporan																	

				Menyusun Materi SL Pengembangan Pupuk Organik	-														
				Menyiapkan Bahan Pendukung	-														
				Pelaksanaan SL Pengembangan Pupuk Organik	-														
				Membuat Laporan Akhir Kegiatan	-														
	Belum Optimalnya produksi Hortikultura	Meningkatnya Luas Panen Hortikultura	Jumlah Luas Panen Sayuran	Membuat SK Koordinator SL Hortikultura	-										√	√	√	√	
				Melakukan Survey Calon Pelaksana SL	-														
				Membahas dan Menetapkan Poktan Pelaksana SL	-														
				Membuat SK Pendamping SL Hortikultura	-														
				Menyiapkan Materi SL	-														
				Menyiapkan Bahan Pendukung SL Hortikultura	-														
				Pelaksanaan SL Horti	-														
				Membuat Laporan Akhir Kegiatan	-														

OPD	KABAG HUKUM

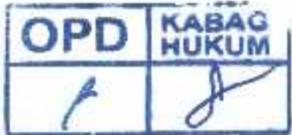
	Sebagian besar pegawai belum memiliki kompetensi bidang tugasnya	Meningkatnya kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya	Persentase peningkatan kapasitas pegawai : 50 %	Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan data dan informasi ketahanan pangan : 100%	Pelatihan Analisa Ketahanan Pangan	Jumlah peserta pelatihan : 10 org	Sekretaris										√	√	√	√	
		Tersusunnya indikator kinerja individu	Persentase pemenuhan dokumen kinerja : 100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan 100%	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen : 17 jenis	Sekretaris											√	√	√	√
		Tersusunnya Sistem Informasi Kepegawaian (SIP) online	Persentase pegawai yang telah mengisi SIP online : 100%																√	√	√	√

OPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

7	Pelaksanaan manajemen kinerja individu yang selaras dengan manajemen kinerja unit atau organisasi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kompetensi dan pengembangan karir pegawai guna mendukung pelaksanaan pengelolaan SDM yang berbasis merit masih belum dimulai.												√	√	√	√
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

OPD	KABAG HUKUM
f	J

		Meningkatnya Manajemen Pengelolaan SDM	Persentase unit kerja Dinas yang menyusun Perencanaan ASN yang sesuai dengan PP 11 Tahun 2017	Perencanaan ANJAB dan ABK																																																				
			Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan Rencana pengadaan Jabatan	Pembinaan dan pengembangan aparatur																																						√	√	√	√											
			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi sesuai dengan rencana pengembangan																																									√	√	√	√									
			Persentase JPT yang ditempatkan melalui open recruitment																																													√	√	√	√					



Kemampuan unit kerja pengelola SDM Pemerintah Kab. Lampung Barat masih berorientasi pada pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan belum pada pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia yang berfokus pada pengelolaan kinerja, pengelolaan kompetensi, dan pengelolaan karir pegawai.	idem	Persentase ASN yang di Mutasi, Promosi sesuai pola karir	idem	SDA	SDA								√	√	√	√
---	------	--	------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---



	Budaya kinerja di kalangan pegawai belum dikembangkan. Hal ini ditandai dengan belum berjalannya pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang didasarkan pada kinerja.	Terciptanya Budaya Kerja Aparatur yang profesional	Jumlah ASN yang mendapatkan Punishment	Pengembangan dan Pembinaan ASN																	√	√	√	√
			Jumlah ASN yang mendapatkan Reward																					

B	<b>Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>																							
1	meningkatkan pengendalian fluktuasi harga bahan pokok		pemantauan harga dan distribusi sembako	Berkurangnya Beban Masyarakat Menjelang Hari Raya	14000 Paket	Bagian perekonomian dan SDA															x	x	x	X
				Meminimalisir Penyelewengan Pelaksanaan Program Rastra	15 Kecamatan	Bagian perekonomian dan SDA															√	√	√	√



			Terpantaunya tingkat inflasi Kabupaten Lampung Barat	12 Bulan	Bagian perekonomian dan SDA												√	√	√	√	
Meningkatnya Persentase Produk Hukum yang Terbentuk dan Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1. Persentase Pembentukan Produk Hukum yang Terealisasi	Penataan Peraturan Perundang-undangan																√	√	√	√
	2. Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan																	√	√	√	√
Meningkatnya kualitas pembentukan peraturan daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang dilakukan Fasilitasi Pembentukannya				- Membuat SK Bupati Kegiatan													√	√	√	√

OPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

					- Mengoreksi Rancangan Perda yang berasal dari OPD															
					- Membahas Rancangan Perda dengan Tim Legislaasi															
					- Membahas Rancangan Perda antara Tim Legislasi dan DPRD															
					- Menyampaikan Ranperda kepada Gubernur dalam rangka tindaklanjut untuk menjadi Perda															
					- Menindaklanjuti pednctapan dan pengundangan Ranperda															

OPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan									
Meningkatnya pengetahuan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasikan Kepada OPD				- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan						√	√	√	√
					- Mendownload Peraturan Perundang-Undangan									
					- Mencetak hasil download Peraturan Perundang-Undangan									



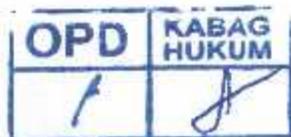
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan														
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Produk Hukum Daerah				- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan											√	√	√	√
					- Membuat Surat ke Kecamatan untuk mengirim Data Peserta Sosialisasi														
					- Menyampaikan Permohonan untuk menjadi Narasumber ke OPD yang terkait														

OPD	KABAG HUKUM
<i>P</i>	<i>J</i>

					- Mensosialisasikan Perda dan Perbup di Kecamatan																	
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan																	
	Meningkatnya kualitas pembentukan peraturan bupati dan keputusan bupati	Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dilakukan Harmonisasi dalam Pembentukannya			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan														V	V	V	V

OPD	KABAG HUKUM
	

					- Mengkoreksi Rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati														
					- Membahas Rancangan Peraturan Bupati yang memerlukan Pembahasan oleh Tim Koordinasi														
					Menindaklanjuti dalam rangka Penandatanganan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati														
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan														



Meningkatnya pengetahuan siswa terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah siswa/ siswi yang Mengikuti Penyuluhan Hukum			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan														√	√	√	√
				- Membuat surat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilanjutkan ke Sekolah																	
				- Melaksanakan Penyuluhan Hukum di Sekolah																	
				- Membuat Laporan Akhir Kegiatan																	



Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di desa/kelurahan	Jumlah Desa yang Masuk dalam Kategori desa sadar Hukum Tingkat Kabupaten			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan														√	√	√	√
				- Membuat Surat ke Kecamatan																	
				- Memverifikasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum																	



					- Menentukan Pemenang Desa/Kelurahan Sadar Hukum														
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan														
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum	Jumlah Produk Hukum yang di Publikasikan dalam Website JDIH				- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan										√	√	√	√	
					- Menguplod Perda dan Perbup Tahun 2017 ke JDIH Lambar														
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan														
																			#



					- Membuat MoU Pemda dengan Advokasi															
					- Pendampingan Bantuan Hukum bagi Aparatur dan Pemerintah Daerah															
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan															
Terlaksananya lomba kadarkum tingkat kabupaten	Jumlah Kecamatan yang Mengikuti Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten				- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan												√	√	√	√
					- Membuat Surat ke Kecamatan															

OPD	KABAG HUKUM
	

					- Memverifikasi Kecamatan yang Rendah Kriminalitas															
					- Menghubungi Dewan Juri Lomba Kadarkum															
					- Menghubungi Peserta Lomba															
					- Pelaksanaan Lomba Kadarkum															
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan															
Meningkatnya kualitas produk hukum dan kesadaran hukum masyarakat	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Penyusunan Produk Hukum Daerah				- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan												√	√	√	√



				- Menghubungi Narasumber dan Peserta Bimtek																	
				- Membuat Surat pada Narasumber dan Peserta Bimtek																	
				- Pelaksanaan Bimtek																	
				- Membuat Laporan Akhir Kegiatan																	
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Jumlah Perda dan Perbup yang dievaluasi			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan														√	√	√	√
				- Mengevaluasi Perda dan Perbup																	

OPD	KABAG HUKUM
<i>f</i>	<i>J</i>

					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan																
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum	Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan kepada Masyarakat				- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan													√	√	√	√
					- Membuat Surat ke Kecamatan untuk Mengirim Data Peserta Sosialisasi																
					- Melaksanakan Sosialisasi																
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan																

OPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap HAM	Jumlah Data Pendukung Capaian RANHAM Kab/Kota oleh Pemerintah Daerah sesuai Prosedur			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan														√	√	√	√
				- Membuat surat ke OPD																	
				- Memverifikasi data pendukung dari OPD																	
				- Membuat Laporan Akhir Kegiatan																	
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD	Persentase Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah produk hukum inisiatif DPRD																		
			4 Buah																		
																100 %		√	√	√	√

	Meningkatnya Harmonisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah yang harmonis/tidak rumpang tindih	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.																																			

C	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI																																					
1	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemkab. Lampung Barat	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Penyusunan Cascading Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Bagian Organisasi																																



2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pemerintah	Meningkatnya Pemahaman Fungsi dan Peran Kelembagaan	Peningkatan Fungsi dan peran Kelembagaan Daerah	50%	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tupoksi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi											√	√	√	√
					Sosialisasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Bagian Organisasi														
					Evaluasi Kelembagaan	Bagian Organisasi														

C	<b>PENATAAN TATALAKSANA</b>																				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Terbina dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Bagian Organisasi												√	√	√	√
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Presentasi OPD yang melakukan tata naskah dinas sesuai peraturan	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Penyusunan Tata Naskah Dinas	Bagian Organisasi												√	√	√	√



Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah Daerah	Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah daerah		12 Bulan	1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan pada Masyarakat	Bagian perekonomian dan SDA		√	√	√	√
---	---	--	----------	--	-----------------------------	--	---	---	---	---

OPD	KAB. HURUM
/	/

				5 Kali, 0 Dokumen	2. Pelaksanaan Koordinai dan Monitoring dan Pengembangan Pertambangan dan Energi sumber Daya Mineral	Bagian perekonomian dan SDA													
				100%	3. Fasilitasi Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Hutan Di Kabupaten Lampung Barat	Bagian perekonomian dan SDA													

OPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

			2 Dokumen	4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyerahan Modal	Bagian perekonomian dan SDA													
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Terbina dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Bagian Organisasi									√	√	√	√
	Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Jasa yang difasilitasi untuk proses	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Penyusunan Standart Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Kasubbag Pengembangan dan Pengadaan									√	√	√	√



	tendernya																	
Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Jasa yang difasilitasi untuk proses tendernya	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Fasilitasi dan Koordinasi proses Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa	Kasubbag Perencanaan Pengadaan									√	√	√	√	
Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Jasa yang difasilitasi untuk proses tendernya	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kasubbag Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen									√	√	√	√	
Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Jasa yang difasilitasi untuk proses tendernya	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Konsultasi Hukum dan Sanggah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kasubbag Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen									√	√	√	√	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Presentasi OPD yang melakukan tata naskah dinas sesuai peraturan	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Penyusunan Tata Naskah Dinas	Bagian Organisasi									x	√	x	x	

Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase dokumen kinerja yang sesuai dengan Prosedur Kerja	Program Penerapan SOP Kelitbangan	Persentase Penerapan SOP	Pembuatan Prosedur Tetap Kegiatan Utama Kelitbangan	Sekretariat														√	√	√	√		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana dan prasarana yang optimal	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	UPT KRL																√	√	√	√
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor																				
				Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer																				

Meningkatnya e government	Persentase mekanisme kerja yang menerapkan e government	Program e- Jurnal	Tersedianya e jurnal untuk memuat hasil penelitian	Jurnal Kelitbangan	Kasubbid Kerjasama dan Publikasi						√	√	√	√	
Meningkatnya mekanisme dan prosedur pelayanan di Disbunnak	Jumlah Dokumen SOP yang baku	Penerapan SOP			Disbunnak							√	√	√	√

D  
KABAG  
HUKUM



					Disbunnak																
	Meningkatnya koordinasi dan pelayanan bidang ketahanan pangan kepada masyarakat	Penyediaan layanan informasi bidang ketahanan pangan	Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan		Pengumpulan data, analisa data, penyajian data, pemanfaatan data													√	√	√	√

OPD	KABAG HUKUM
f	J

					Penyiapan materi siaran, pelaksanaan siaran						
			Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan		Pengumpulan data, analisa data, penyajian data, pemanfaatan data						

OPD	KABAG HUKUM
<i>f</i>	<i>J</i>

					Pengmpulan data, analisa data, penyajian data, pemanfaatan data, koordinasi, tindakan intervensi						
			Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Kelembagaan Pangan		Pengumpulan data, analisa data, penyajian data, pemanfaatan data						
					Pengumpulan data, analisa data, penyajian data, pemanfaatan data						

		Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan		Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan : 1 dok																		
	Meningkatnya Penyelenggaraan pendidikan Non formal	Persentase penduduk tidak sekolah mengikuti pendidikan Non Formal	Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal		1. SK Pemaketan														√	√	√	√
					2. Proses pengadaan																	
					3. Kontrak keraja																	
					4. Berita Acara serah terima																	
					1. SK Pemaketan																	
					2. Proses pengadaan																	
					3. Kontrak keraja																	

OPD	KAB. HUKU.
A	J

				4. Berita Acara serah terima																	
				1. Sk Penerima Alat Bermain																	
				2. Procs pengadaan																	
				3. Kontrak keraja																	
				4. Berita Acara serah terima																	
Persentase peningkatan prasarana dan sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengemb. Prasarana dan Sarana Pertanian	Tersedianya Infrastruktur Pertanian		Melakukan Survey Lokasi Kegiatan														√	√	√	√
		20%		Melakukan Survey Harga Barang																	
				Membuat SK Pejabat Pengadaan																	
				Menetapkan Lokasi Kegiatan																	
				Melakukan Penyusunan SIDE																	
				Membuat SK Paket Pekerjaan																	
				Melaksanakan Pengadaan Kegiatan Fisik																	
				Melaksanakan Pekerjaan Fisik																	
				Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan																	

				Membuat Laporan Akhir Kegiatan															
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E PENATAAN MANAJEMEN SDM APARATUR																					
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Perhitungan Kebutuhan PNS	Bagian Organisasi													√	√	√	√
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Perhitungan Kebutuhan PNS	Bagian Organisasi													√	√	√	√
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pelaku Pengadaan yang memahami Aturan Pengadaan dalam pelaksanaan tender	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Bimbingan Teknis Penyusunan HPS dan Kontrak	Kasubbag Perencanaan Pengadaan													√	√	√	√



Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pelaku Pengadaan yang memahami Aturan Pengadaan dalam pelaksanaan tender	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Bimbingan Teknis Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Kasubbag Perencanaan Pengadaan											√	√	√	√
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pelaku Pengadaan yang memahami Aturan Pengadaan dalam pelaksanaan tender	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Bimbingan Teknis Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Kasubbag Pengembangan dan Pengadaan											√	√	√	√
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pelaku Pengadaan yang memahami Aturan Pengadaan dalam pelaksanaan tender	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Bimbingan Teknis Administrasi dan Hukum Pengadaan Barang/Jasa	Kasubbag Pengembangan dan Pengadaan											√	√	√	√
Persepsi dan penerapan reformasi birokrasi belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh aparatur	Meningkatnya pola pikir dan budaya kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Persentase aparatur yang kinerjanya baik	Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah aparatur yang meakukan pelatihan/ diklat ; 2 orang	Mengirimkan peserta diklat, perubahan prilaku kerja											√	√	√	√



Sebagian besar pegawai belum memiliki kompetensi bidang tugasnya	Tersusunnya indikator kinerja individu	Persentase pemenuhan dokumen kinerja : 100%	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen : 17 jenis	Mempersiapkan data pendukung Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD												√	√	√	√
					Membahas dan Memeriksa Draf Laporan															
					Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan															
	Tersusunnya Sistem Informasi Kepegawaian (SIP) online	Persentase pegawai yang telah mengisi SIP online : 100%			pengumpulan berkas dan entry data Masing-masing ASN ke aplikasi SIP Online															
Meningkatnya kualitas Penyuluh Pertanian dan	Persentase Penyuluh Pertanian dan Lembaga	Program Peningkatan Penyuluh Pertanian dan	Pelatihan Penyuluh Pertanian	58,451,500	Membuat SK Panitia, Narasumber dan Peserta												√	√	√	√

Lembaga Tani	Petani yang berkualitas	Kelembagaan Tani																	
						Mempersiapkan Bahan Pendukung													
						Melakukan Koordinasi													
						Mempersiapkan Materi Pertemuan													
						Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan													
						Membuat Laporan akhir													
			Terbinanya Kelompok Tani	195,366,500		Membuat SK Panitia Pelaksana Kegiatan													
						Membuat SK Peserta													
						Mempersiapkan Bahan Pendukung													
						Pelaksanaan Kegiatan Bedah dan Benah poktan													
						Rapat Pembahasan dan Penetapan													
						Membuat Laporan Akhir Kegiatan													

OPD	KABAG HUKUM

			Jumlah dokumen : 1 dok																	
Terpenuhinya seluruh dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	Persentase pemenuhan dokumen : 100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen : 17 jenis											√	√	√				√
			Jumlah dokumen : 12 dok																	
			Jumlah dokumen : 2 dok																	
			Jumlah dokumen : 1 dok																	
			Jumlah dokumen : 1 dok																	
			Jumlah dokumen : 1 dok																	

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dalam pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan	Nilai SAKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						√	√	√		√	
			4 Dokumen											
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran							√	√	√		√
			1 Dokumen											
			Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran							√	√	√		√
			1 Dokumen											

OPD	KAB. HUKUS
f	J

			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun														√	√	√	√
			1 Dokumen																	
			Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD														√	√	√	√
			18 Dokumen																	
			Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah														√	√	√	√
			12 Orang																	
			Jumlah dokumen Renstra OPD														x	x	x	x
			1 Dokumen																	

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dalam pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan	Nilai SAKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									√	√	√		√	
			4 Dokumen														
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran										√	√	√		√
			1 Dokumen														
			Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran										√	√	√		√
			1 Dokumen														
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun										√	√	√		√

OPD KABAG HUKUM  
 

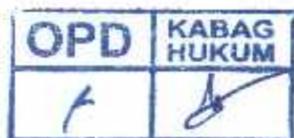
			1 Dokumen																
			Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD											√	√	√			√
			18 Dokumen																
			Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah											√	√	√			√
			16 Orang																
			Jumlah dokumen Renstra OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x			√
			1 Dokumen																
			Jumlah dokumen Renstra SKPD 2017-2022											x	x	x			x
			1 Dokumen																

OPD	KABAG HUKUM

G PENGUATAN PENGAWASAN												
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal	Jumlah OPD yang melaksanakan PMPRB	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	8 OPD	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Inspektoral						√
		Jumlah OPD yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		2 OPD			Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Inspektoral				
	indeks maturitas SPIP	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Indeks Maturitas SPIP 3	Penilaian Maturitas SPIP	Inspektoral							√

OPD	KABAG HUKUM
f	<i>[Signature]</i>

		Level Kapabilitas APIP		Level 3	Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektoral														
2	Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK	Persentase Temuan Selesai ditindak lanjuti	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	78%	1 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektoral							√	√	√	√				
							2 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK													
3	Terlaksananya Evaluasi SAKIP OPD	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal "B"		70%	Evaluasi SAKIP OPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemda	Inspektoral								√	√	√	√			
4	Terlaksananya penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima	Persentase Pengaduan Masyarakat selesai		90%	Penanganan kasus pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Inspektoral								√	√	√	√			
5	Terlaksananya Audit berbasis Kinerja terhadap OPD tertentu	Jumlah Pelaksanaan Audit Kinerja terhadap OPD		10 OPD	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Inspektoral								√	√	√	√			



6	Tersusunnya PKPT berbasis Risiko	Jumlah PKPT Berbasis Risiko		4 PKPT Berbasis Risiko	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Inspektoral												√	√	√	√	
	Tersusunnya Peta Auditan	Jumlah Peta Auditan		16 Peta Auditan																√	√	√

OPD	KABAG HUKUM

H Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik														
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Persentase Publikasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Media Massa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100%	Pembuatan dan Penerbitan Majalah Begui Jejama	Bagian Humas dan Protokol						√	√	√	√
					Penerbitan Buku Selayang Pandang	Bagian Humas dan Protokol								
					Peningkatan Kualitas Penyiaran Radio	Bagian Humas dan Protokol								

OPD KABAG HUKUM





meningkatnya kualitas Layanan Pemkab. Lampung Barat	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Bimtek Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	Bagian Organisasi													
meningkatnya kualitas Layanan Pemkab. Lampung Barat	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Fasilitasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat.	Bagian Organisasi													
meningkatnya kualitas Layanan Pemkab. Lampung Barat	Meningkatnya Pemahaman Fungsi dan Peran Kelembagaan	Peningkatan Fungsi dan peran Kelembagaan Daerah		Fasilitasi Pencapaian SPM	Bagian Organisasi													

OPD	KABAG HUKUM
<i>f</i>	<i>g</i>



		terpenuhi			dan LPSE																		
					Operasional Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Online Kabupaten Lampung Barat	Kepala Sub Bagian Pelaporan																	
meningkatkan kualitas Layanan Pemkab. Lampung Barat	Terbina dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		20%	Pembuatan SK Tim Admin Lokal, Pejabat Penghubung dan Administrator OPD															√	√	√	√
					Pelaksanaan Pendampingan Teknis																		

					Pelaksanaan SIPP dan SP4N																
	meningkatnya kualitas Layanan Pemkab. Lampung Barat	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Pembuatan SK Tim Koordinasi													√	√	√	√
					Rapat persiapan sekaligus Pelaksanaan Survei																
					Pelaksanaan Survei Oleh Tim																
					Rapat ekspose Hasil Survei																
					Penyusunan Dokumen Hasil Survei																

OPD KABAG HUKUM  



					i														
					Pelaksanaan Survei Lanjutan														
meningkatkan kualitas Layanan Pemkab. Lampung Barat	Meningkatnya Pemahaman Fungsi dan Peran Kelembagaan	Peningkatan Fungsi dan peran Kelembagaan Daerah		50%	Pembuatan SK Tim Koordinasi														
					Rapat Tim dalam rangka penyusunan SPM														
					Rapat reviu hasil penyusunan dokumen SPM														
					Cetak Hasil Doku														



					men														
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Persentase Publikasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Media Massa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Peningkatan Publikasi Kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Media Massa	Persentase Peningkatan Publikasi Kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Media Massa - 100%	Mem buat SK Bupati tentang Redaksi Majalah Begeai Jeju ma TA 2018										√	√	√	√	
					Mengump ulkan bahan dan pemb uatan artike l														
					Cetak Majalah														



					Pendi strib usian Majal ah Begu ai Jeja ma														
					Mem buat SK Pengg una Angg aran tent a ng Reda ksi Buku Selay ang Pand ang TA 2018														
					Meng ump ulkan baha n dan pemb uatan artike l														
					Cetak Buku Selay ang														

OPD	KABAG HUKUM
f	✓

					Pandang														
					Pendistribusian Buku Selayang Pandang														
					Mem buat SK Bupati tentang Pembinaan dan Pengelolaan Radio Swara Praja 98,6 FM TA 2018														

					Koor dinas i deng an Balai Frequ ensi Radio , KOMI NFO Provi nsi Lamp ung dan KPID Lamp ung serta KEM ENK OMIN FO RI																	
					Pelak sana an siara n rutin																	
					Mem buat SK Pengg una Angg aran tenta ng																	

					Petugas Lapangan Bagian Humas dan Protokol TA 2018														
					Melaksanakan peliputan dan dokumentasi serta membuat rilis berita kegiatan Pemkab. Lampung Barat di dalam maupun luar daerah														

OPD	KABAG HUKUM
f	y

					Mem buat SK Pengg una Angg aran tenta ng Penge lola Pemb uatan Poste r dan Balih o Pemb angu nan TA 2018														
					Pelak sana an Peme lihara an dan pemb uatan Billbo ard														

					Pence- takan Balih o, Span- duk dan Stick- er serta pelak- sana- an publi- kasi progr- am pemb- angu- nan melal- ui sewa billbo- ard													
					Pence- takan Balih o dan Span- duk untu- k mom- en hari- hari besar													

					Mem buat Surat Perja njian Kerja (SPK)														
					Penyi apan baha n advet orial dan Pener bitan pada SKH U dan Medi a Digi tal														
					Penyi apan baha n advet orial dan Pener bitan pada SKM														

OPD	KABAG HUKUM
f	A

						Mem buat SK Pengg una Angg aran tent ng Penge lola Pemb uatan Bingk ai beser ta Foto Pejab at Negar a TA 2018														
						Persi apan kelen gkap an admi nistra si dan pemil ihan penye dia														
						Cetak Foto beser ta Pemb uatan														

OPD	KABAG HUKUM
<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

						bingk ai foto														
						Pendi strib usian Bingk ai beser ta Foto														
						Mem buat Surat Perja njian Kerja (SPK)														
						Persi apan kelen gkap an admi nistra si														
						berko ordin asi deng an penye dia jasa kons ultasi														

OPD	KABAG HUKUM
<i>P</i>	<i>J</i>

					pelaksanaan kegiatan rekrutmen														
					laporan akhir kegiatan														
	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu - 100%	Membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK)											√	√	√	√
					Pencatatan, pendokumentasian dan pendistribusian SKHU,														

OPD KABAG HUKUM  
 f A

					SKM, Majalah														
					Mem buat Surat Perjanjian Kerja (SPK)														
					Penyiapan bahan dan penerbitan publikasi pembangunan (IKLAN)														
					Penyiapan bahan-bahan pameran pembangunan														

OPD	KABAG HUKUM
f	

					Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan																
Efektifitas pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persentase Layanan Sekretariat Daerah terpenuhi	Pengendalian Administrasi Pembangunan		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat	Mem buat SK Tim LPSE													√	√	√	√
					Operasional Sistem SPSE																
					Pemeriksaan Sistem SPSE																
					Mem buat surat undangan rapat Tim																
					Melaksanakan asistensi pengg																



					Mela kuka n Sosa lisasi dan Prose s Entry Data SiAP Onlin e																
					Mela kuka n Monit oring atas Entry bulan an Data SiAP Onlin e																
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Meningkatnya Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Daerah	Peningk atan Fungsi dan Peran Kelemb agaan Daerah		Meningkatnya Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Daerah	Mem buat SK Tim Koor dinas i Monit oring dan Evalu asi Pelak sana													√	√	√	√

OPD	KABAG HUKUM
<i>f</i>	<i>b</i>

					una SPSE														
					Mem buat surat permohonan narasumber														
					Mem buat surat undangan peserta sosialisasi														
				100%	Melaksanakan kegiatan sosialisasi														
					Melaksanakan belanja modal														
					Mem buat SK Tim														

OPD	KABAG HUKUM

						an Pelay anan Admi nistra si Terpa du Keca mata n													
						Mem buat forma t pelap oran perizi nan PATE N													
						Mem buat surat permi ntaan lapor an perizi nan PATE N ke 15 keca mata n di Kabu paten Lamp													

OPD	KABAG HUKUM
<i>P</i>	<i>J</i>

					ung Barat													
					Meng ump ulkan lapor an perizi nan PATE N dari 15 keca mata n di Kabu paten Lamp ung Barat													
					Rapat peny usun an lapor an PATE N													
					Meny usun lapor an PATE N													

OPD	KABAG HUKUM

					Mencetak Buku laporan PATE N																	
2	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data	Persentase akurasi dan aktualitas data bidang pendapatan daerah	KABID PBB														√	√	√	√
		Persentase peningkatan PAD		Persentase akurasi dan aktualitas data bidang PBB																		
					KABID PBB																	
					KABID PENDAPATAN DAE																	

OPD KABAG HUKUM

						RAH												
						KABI D PBB												
						KABI D PEND APAT AN DAE RAH												
						KABI D PEND APAT AN DAE RAH												
						KABI D PEND APAT AN DAE RAH												
						KABI D PEND APAT AN DAE RAH												
						KABI D PEND APAT AN DAE RAH												

OPD	KABAG HUKUM
f	↙

					KABID PENDAPATAN DAERAH															
					KABID PENDAPATAN DAERAH															
		Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB	Persentase realisasi PBB		KABID PBB															
		Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase realisasi PAD		KABID PENDAPATAN DAERAH															

OPD	KABAG HUKUM

			serta PBB													
						KABID PENDAPATAN DAERAH										
						KABID PBB										
1	Meningkatnya Profesionalisme Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja											√	√	√	√
		Persentase Kinerja Aparatur Dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran														
			Program Pelayanan Administrasi Perkant													

OPD	KABAG HUKUM
<i>f</i>	<i>h</i>



			Kebersihan Kantor	14 Jenis															√	√	√	√
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	32 Jenis															√	√	√	√
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis															√	√	√	√
				2 Jenis																√	√	√
			Penyediaan Komponen Instalasi listrik penerangan Bangunan Kantor.	2 Jenis															√	√	√	√

			Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan	4 SKHU														√	√	√	√
			Penyediaan Makanan dan Minuman	24 Kali														√	√	√	√
				24 Kali															√	√	√
			Rapat-Rapat Koord.& Konsul. ke Luar Daerah	12 Bulan														√	√	√	√
			Penyediaan Jasa Propaganda / Publikasi/ Pameran	1 Kali														√	√	√	√

OPD	KABAG HUKUM

			Rapat-Rapat Koord.& Pembinaan Dalam Daerah	12 Bulan															√	√	√	√
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit																		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Unit																		



			Progra m Peningk atan Kapasit as Sumber Daya Aparatu r																
				Pendidikan dan pelatihan formal	4 Orang										√	√	√	√	
			Progra m Peningk atan Pengem bangan Sistem Pelapor an Capaian Kerja dan Keuang an																

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen												√	√	√	√	
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen													√	√	√	√
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen													√	√	√	√

			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen														√	√	√	√
			Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	19 Dokumen														√	√	√	√
			Pengelolaan Keuangan Daerah	13 Orang														√	√	√	√
			Penetapan Renstra OPD Tahun 2017-2022	10 Buku														√	√	√	√

2	Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten																			
		Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD																			
		Persentase Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD																			
		Persentase Tingkat Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD																			
		Progra m Perenca naan Pemban gunan Daerah																			
			Pengemban gan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan	15 Kecamatan														√	√	√	√

OPD	KABAG HUKUM
	

			Publik.																								
			Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	250 Orang																							
			Penetapan RPJMD	200 Buku																							
			Penyusunan Rancangan RKPD	40 Eks																	√	√	√	√			
				40 Eks																		√	√	√	√		
			Penyelengg	250 Orang																				√	√	√	√

KABAG HUKUM

			Penetapan RKPD	40 Eks											√	√	√	√
				40 Eks											√	√	√	√
			Penyusunan KUA dan PPAS	40 Eks											√	√	√	√
				40 Eks											√	√	√	√
			Pengembangan Aplikasi e- Planning/ Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	1 Aplikasi											√	√	√	√
			Penyusunan Rencana	20 Eks											√	√	√	√





			Klaster Kopi di Kawasan Agropolitan																								
			Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan SDG's Kabupaten Lampung Barat	50 Eks																√	√	√	√				
			Study Kelayakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1 Buku																		√	√	√	√		
			Program Perencanaan Tata Ruang																								
			Koordinasi	12 Bulan																				√	√	√	√

OPD	KABAG HUKUM
	

			Percepatan Penataan Kota Liwa																
			Koordinasi Penataan Ruang Daerah	10 Eks															
			Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam																
			Koordinasi Perencanaan bidang Prasarana Wilayah dan SDA	12 Bulan															
			Fasilitasi dan	10 Eks															

OPD	KABAG HUKUM







			Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda)																
			Evaluasi RPJMD Kabupaten Lampung Barat	35 Buku															
			Penyusunan Aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (e-LKPj)	1 Aplikasi 30 Orang															
4	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Persentase Keterisian Data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)																	
		Persentase Data Pembangunan Yang Terintegrasi																	





		Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme	Jumlah peserta sosialisasi	49,150,000															
		Dialog Interaktif Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta dialog interaktif	-															
		Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Kunjungan Tamu Luar Daerah /Orang	Jumlah laporan	14,008,500															

		Asing (WNA)																
		<b>PROGR AM KEMIT RAAN PENGE MBANG AN WAWAS AN KEBAN GSAAN</b>	<b>Persentase pertumbuh an dan perkembangan Ormas/LS M di Kab. Lampung Barat.</b>	<b>421,604,000</b>														
		Forum Pembau ran Kembang saan (FPK)	Jumlah pembinaan FPK															

OPD      KABAG. HUKUM  
      

		Tes Urine bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Jumlah PNS yang mengikuti tes urine	168,000,000												√	√	√	√
		Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	200,656,000												√	√	√	√



			Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Jumlah peserta	52,948,000																		
2	Meningkatnya penanganan penyelesaian kasus konflik SARA	Jumlah konflik SARA yang diselesaikan	<b>PROGR AM KEMIT RAAN PENGE MBANG AN WAWAS AN KEBAN GSAAN</b>	<b>Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di Kab. Lampung Barat.</b>	<b>133,726,500</b>															√	√	√	√
			Penyediaan Jasa Pendukung Komunitas Intelijen Daerah	Jumlah laporan	113,728,000																-	-	-

<b>OPD</b>	<b>KABAG HUKUM</b>
<i>f</i>	<i>g</i>

		(KOMIN DA)																				
			Rapat Koordin asi Tim Terpad u Penang anan Konflik Sosial Kabupa ten Lampu ng Barat	Jumlah laporan	19,998,500																	
			Tim Kewasp adaan Dini Pemerin tah Daerah	Jumlah laporan	-																	
3	Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk secara formal	Jumlah kelompok masyarakat yang memenuhi syarat legalitas	<b>PROGR AM KEMIT RAAN PENGE</b>	<b>Persentase pertumbuh an dan perkemban gan</b>	<b>148,981,000</b>														√	√	√	√



		<b>MBANG AN WAWAS AN KEBAN GSAAN</b>	<b>Ormas/LS M di Kab. Lampung Barat.</b>																	
		Forum Silatura hmi dan Pembin aan Ormas/ LSM Kabupa ten Lampu ng Barat	Jumlah peserta forum silaturahmi	130,593,000																
		Penyus unan Data Base Kesban g dan Politik	Jumlah dokumen data base Kesbangpol	18,388,000																





		Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah berkas partai politik penerima bantuan keuangan yang di verifikasi	41,419,000																
		Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik	Jumlah peserta sosialisasi	122,808,000																

		Tim Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat	Jumlah laporan tim desk pemilu Bupati	-													-	-	-	
		Tim Desk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung	Jumlah laporan tim desk pemilu Gubernur	299,928,000													-	-	-	
		Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Jumlah laporan tim desk pemilu Legislatif dan Presiden	-																
Meningkatkan	Indeks kepuasan Pelayanan	1. Pelayanan Pendaftaran	Lamanya Pembuatan KTP (1 hari)	Jumlah KK yang Terbit													√	√	√	√





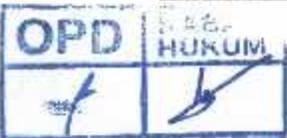


					ja															
				100%	Mem buat Lapor an															
					Meny usun Renc ana Lapor an Seme stera n															
					Mela ksan akan Koor dnias i															
					Pelak sana an Peny usun an															
					Mem buat Lapor an															
					Meny usun Renc ana Lapor an Progn															

OPD	KABAG HUKUM
<i>f</i>	<i>[Signature]</i>



					Koordnias i															
					Pelaksana an Peny usun an															
					Mem buat Lapo ran															
					Meny usun Renc ana Evalu asi dan Pelap oran Doku men Peren cana an															
					Mela ksan akan Koor dnias i															
					Pelak sana an Peny usun an															
					Mem															



					buat Laporan														
					Menyusun Rencana Pengelolaan Keuangan Daerah														
					Melaksanakan Koordinasi														
					Pelaksanaan Kegiatan														
					Membuat Laporan														
					Menyusun Rancangan Renstra														
					Melaksanakan														

OPD	KABAG HUKUM
f	



<p>Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan belum optimal dalam upaya untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Publik berbasis IT.</p>	<p>Persentase Pelayanan yang telah berbasis IT secara terintegrasi</p>		<p>Jumlah sistem pelayanan Disbunnak yang ditingkatkan</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan informasi pembangunan	Persentase media informasi pembangunan yang mendapat respon masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi																
--	--	---	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OPD	KABAG HUKUM
<i>f</i>	<i>d</i>

		Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan kepada masyarakat secara up to date		Jumlah informasi pembangunan yang up to date																	
tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan	pelayanan pengelolaan persampahan	penyediaan prasarana dan sarana pengolahan persampahan		terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang baik	menyusun data jumlah kendaraan pengangkut sampah													√	√	√	√
					Melaksanakan Koordinasi																



					Pelaksanaan Kegiatan														
					Mem buat Laporan sarana dan prasarana persampahan														
Tercapainya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya Jumlah Kasus Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tempat pos pengaduan masyarakat														
					Melaksanakan peninjauan lokasi pengaduan														
					Mem beri teguran kepada														

OPD	KABAG HUKUM
<i>t</i>	<i>[Signature]</i>

					da pihak yang bersangkutan															
					Mem buat laporan kepada pimpinan sesuai dengan arahan pimpinan															
Tercapainya Pemasangan dan Pemeliharaan penerangan jalan umum di beberapa wilayah	Persentase Ketersediaan Pemasangan dan Pemeliharaan Penerangan umum	Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Penerangan Umum		Terwujudnya Pemasangan dan Pemeliharaan Penerangan umum	Mebu at data titik lampu yang belum di pasang															
					Mela kukan koord inaasi															

OPD KAS HUKUM  


					Pelaksanaan Kegiatan														
					Mem buat laporan lampu yang sudah terpasang														
					Membuat data titik lampu yang belum di pelihara														
					Melakukan koordinasi														
					Pelaksanaan Kegiatan														

OPD KABAG HUKUM



Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Layanan Informasi Kepada Masyarakat	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pelayanan dan Perluasan Akses Komunikasi dan Informasi																√	√	√	√
			Jumlah Peserta	40 Orang																		
Birokrasi yang bersih dan akuntabel			Jumlah Alat Studio	8 Unit																		



Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Jumlah hotline sms center sebagai media aspirasi dan informasi masyarakat Lampung Barat	2 Hotline/12 Bulan																√	√	√	√
Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Jumlah Media	88 Media																			

Birokrasi yang bersih dan akuntabel			Jumlah Tower	80 Tower													√	√	√	√
Birokrasi yang bersih dan akuntabel			Jumlah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta sistem penyediaan layanan informasi secara cepat mudah dan wajar	12 bulan/1 Tahun																

OPD	KABAG HUKUM



Terwujudnya OPD yang Melaksanakan E-government	% OPD yang melaksanakan E-Government	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Penerapan dan Pengkajian Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)															√	√	√	√
			Jumlah Tim Bankom	4 Orang	Monitoring kondisi wilayah																
					Pelaksanaan Bankom di lokasi bencana																
					Laporan pelaksanaan kegiatan																
Terwujudnya OPD yang Melaksanakan E-government			Jumlah Pengembangan Android	1 Unit	Koordinasi dan Konsultasi ke Kekominfo																

OPD	KABAG HUKUM
f	↓

						RI untu k mew ujud kan smart city														
						Meng ajuka n Nota Dinas perub ahan Nomo r Reke ning dari Belan ja Moda l peng adaa n peral atan jaring an menj adi Belan ja Moda l peng adaa n sofwa re														

OPD	KABAG HUKUM
<i>P</i>	<i>J</i>

						aplikasi														
						Menyapkan dokumen lelang untuk BM Pengadaan Software Aplikasi Smart City														
						Koordinasi dengan KLP kaitan tahapan lelang BM Pengadaan														

OPD	KABAG HUKUM
	



Terwujudnya OPD yang Melaksanakan E-goverment			Jumlah Website	1 Website	Koordina i dan Kons ultasi ke Disko minfo Propi nsi, PT. Telko m dan Keme nkom info RI						√	√	√	√	
					Mela kuka n Peme lihara an Jarini gan Serve r										
					Mela kuka n pemb elian Bara ng berup a RAM, Lapto p, Invert er,										

OPD  
Ket. Hukum  
f



Tersedianya Data Informasi Publik yang akurat, Aman dan Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM)			Tersedianya Sarana Komunikasi Radio	11 Unit	Menyusun Ulang Perkiraan Sendiri													√	√	√	√			
					Proses Pengadaan																			
					Serah Terima Barang																			
					Pembayaran																			
Tersedianya Data Informasi Publik yang akurat, Aman dan Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM)			Jumlah Kecamatan	15 Kecamatan	Monitoring di 15 Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat															√	√	√	√	
Meningkatnya Data informasi Hasil Pembangunan yang akurat	Meningkatnya Data Informasi Hasil Pembangunan yang Akurat	Program Pengembangan Data/Informasi/Statist	Penyajian Data Statistik Sektoral																		√	√	√	√







<p>Kurangnyan Kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan sehat tanpa pengawet</p>	<p>Meningkatnya jumlah produk hasil perikanan yang sehat</p>	<p>Jumlah produk olahan ikan</p>	<p>Program Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</p>		<p>Bidang Pengendalian dan Pemasaran</p>	<p>Menyusun Jadwal Kegiatan, Membuat SPT, Membuat laporan</p>		<p>√</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	<p>√</p>
---	--	----------------------------------	---	--	--	---	--	----------	----------	----------	----------

OPD	KABAG HUKUM
✍	✍

Belum sesuaiya Produksi Perikanan dengan Penebaran Benih Ikan Pada Masyarakat / Kelompok Pembudidaya Ikan	Meningkatnya Jaminan Kesehatan Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap			Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Menyusun Jadwal Kegiatan, Membuat SP T, Membuat laporan					√	√	√	√
---	-------------------------------------	--	---	--	--	---------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	---



Kurang nya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan		Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap			Bidang Pengendalian dan Pemasaan	Menyusun Jadwal Kegiatan, Membuat SP T, Membuat laporan					√	√	√	√
--	--	--	---	--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	---

OPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

<p>banyak embung/cek dam yang tidak terawat sehingga mengurangi fungsi embung/cek dam tersebut</p>		<p>Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap</p>	<p>Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap</p>			<p>Bidang Pengendalian dan Pemasaan</p>	<p>Menyusun Jadwal Kegiatan, Membuat SP T, Membuat laporan</p>							<p>√</p>	<p>√</p>	<p>√</p>	<p>√</p>
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------

OPD	KABAG HUKUM
f	[Signature]



					NTAS I														
					Penerbitan Berita Melalui Jaringan Internet dan Website	KASU BBA G HUMAS DAN DOKUME NTAS I													
						KABA G UMUM DAN KEHUMA SAN													
						KASU BBA G HUMAS DAN DOKUME NTAS I													
					Pembuatan dan Penerbitan Majalah	KASU BBA G HUMAS DAN DOK													



					UMEN TAS I														
					KABA G UMU M DAN KEH UMA SAN														
					KASU BBA G HUM AS DAN DOK UME NTAS I														
				Jasa Penyiaran Televisi Daerah dan Streaming Media Online	KASU BBA G HUM AS DAN DOK UME NTAS I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					KASU BBA G HUM AS DAN DOK UME NTAS I														



					1																	
						KABA G UMU M DAN KEH UMA SAN																
						KASU BBA G HUM AS DAN DOK UME NTAS I																
	<b>Belum adanya panti Sosial guna Menampung para PMKS</b>	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peremp uan Rawan Sosial Ekonom i	Pemberday aan Fakir Miskin,KAT dan PMKS lainnya	Pembuatan SK Kegiatan,mengelu arkan surat pemberitahuan tentang kegiatan TKSK, Menyeleksi proposal														√	√	√	√
					mengeluarkan surat pemberitahuan tentang kegiatan TKSK, Menyeleksi proposal																	
					Menyeleksi proposal																	

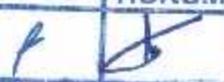
OPD	KABAG HUKUM

		PMKS Lansia (Lanjut Usia Terlantar)		Membuat SK Kepala Dinas, menyiapkan surat undangan, mengadakan rapat persiapan, membagikan blangko kepada TKSK, Monitoring terhadap TKSK, Entry Data dan cetakan Buku																
				menyiapkan surat undangan																
				mengadakan rapat persiapan																
				membagikan blangko kepada TKSK																
				Monitoring terhadap TKSK																
				Entry Data dan cetakan Buku																
				Cetak Buku hasil Pemeriksaan TKSK dan PMKS																
		PMKS Cacat (Penyandang Disabilitas)		Mempersiapkan SK Tim Koordinasi PKH, Mempersiapkan Pelaksanaan Sosialisasi, mempersiapkan Pelaksanaan PKH, mempersiapkan Rapat Pendamping Operator PKH, Mempersiapkan Parat Tim Koordinasi mengklasifikasi																

				untuk narasumber PKH																	
				Memperiapkan Pelaksanaan Sosialisasi																	
				mempersiapkan Pelaksanaan PKH																	
				mempersiapkan Rapat Pendamping Operator PKH																	
				Memperiapkan Rapat Tim Koordinasi mengklasifikasi untuk narasumber PKH																	
<b>Masih Banyaknya Jumlah Keluarga Miskin</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial	Persentase Penyandang Cacat yang Mandiri	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks trauma	Menyiapkan dan menyampaikan surat ke Kecamatan untuk mendapatkan KUBE, mengoreksi Proposal KUBE, memfasilitasi Penyerahan bantuan bagi KUBE PACA mengoreksi Proposal KUBE														√	√	√	√

OPD KABAG HUKUM  
 

				memfasilitasi Penyerahan bantuan bagi KUBE PACA															
				Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat															
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Mempersiapkan Peserta Pelatihan TAGANA di 15 Kecamatan, mempersiapkan narasumber, Instruktur Pelatihan TAGANA, Mempersiapkan sarana dan prasarana Pelatihan															
				Mempersiapkan Peserta Pelatihan TAGANA di 15 Kecamatan,															
				Mempersiapkan Narasumber, Instruktur Pelatihan TAGANA															
				Mempersiapkan Sarana dan Prasarana Pelatihan															
				Mempersiapkan Pelaksanaan Penilaian Organisasi dan Kepemudaan															
				Melaksanakan dan memfasilitasi bagi Penyandang Cacat															

OPD KABAG HUKUM  


				Memelihara Taman Makam Pahlawan																
			Penanganan Rumah Tidak Layak huni (RTLH)	Memvalidasi Data rumah Tidak Layak Huni (RTLH)																
			Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Mendata peserta untuk operasi katarak, mempersiapkan dan berkoordinasi kerumah sakit yang melaksanakan Operasi Katarak, mendampingi peserta yang akan melaksanakan Operasi Katarak																
				Mendata peserta Katarak																
				mempersiapkan dan berkoordinasi kerumah sakit yang melaksanakan Operasi katarak																
				mendampingi peserta yang akan melaksanakan Operasi Katarak																



	<b>Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Barat,yang merupakan Daerah rawan bencana terutama longsor dan gempa</b>	Masyarakat yang tertimpa bantuan Bencana	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Memfasilitasi Operasional Pengelolaan Bantuan Bencana														√	√	√	√		
			Bantuan dan Penanggulangan Bencana	Memfasilitasi Operasional Pengelolaan Bantuan Bencana dan mendampingi dalam penyerahan bantuan bencana																			
1 2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Publik berbasis IT.	indeks kepuasan pelayanan masyarakat.	Pegembangan dan Pengelolaan Infrastruktur																	√	√	√	√
		Persentase unit kerja Dinas yang menerapkan pelayanan berbasis IT secara terintegrasi																					

OPD	KABAG HUKUM
f	J.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan informasi pembangunan	Persentase media informasi pembangunan yang mendapat respon masyarakat																				√	√	√	√			
	Persentase informasi pembangunan yang dipublish kepada masyarakat secara up to date																										
Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat (Jamkesmas/JKN)	Persentase Pasien kurang mampu JAMKESMAS/JKN PBI rawat inap yang dilayani	Penyediaan makanan pendamping pasien kurang mampu JAMKESMAS/JKN PBI	Menyediakan makanan minum pendamping pasien Jamkesmas /JKN PBI (70 org x 12 bln x 3 kl x 5 hr)	23,775,000																				√	√	√	√

OPD	KABAG HUKUM
1	8



meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks kepuasan masyarakat	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi RS berbasis IT	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat								√	√	√	√
--	----------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

OPD	KABAG HUKUM
f	j

**A. Monitoring**

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap tiga bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey dilakukan enam bulan sekali;
3. Pengelolaan pengaduan.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam tigabulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam tiga bulan.
3. Pengelolaan pengaduan.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-

- masing OPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala OPD secara rutin, paling tidak satu bulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala OPD;
  3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
  4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
  5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

## **B. Evaluasi**

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan



- yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey dilakukan enam bulan sekali;
3. Pengelolaan pengaduan.
  4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
  5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam satu tahun sekali.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala OPD.
3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.



Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

**BAB V**  
**PENUTUP**

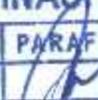
Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2018 – 2022 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan OPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2018 – 2022 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Organisasi	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KORUM HUKUM	